

# **PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM**

**Siti Mujiatun**

Dosen Fakultas Ekonomi UMSU  
Kandidat Doktor PPS UIN SU

## **Abstrak**

Ekonomi mempunyai peranan yang sangat urgen dalam kehidupan umat manusia. Dalam pengembangannya dapat dilakukan dengan berbagai cara atau sistem. Sampai dewasa ini ada tiga sistem pengembangan ekonomi yaitu kapitalis/liberal, sosialis dan Islam. Inilah permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskrip analitik terhadap ketiga sistem dimaksud dengan melihat bagaimana peran pihak pemerintah dalam pengembangannya. Sebagai kesimpulan dari uraian ini, dapat dinyatakan bahwa kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah milik privat. Dengan kata lain; Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian yang memberikan wewenang penuh kepada Capital atau pemodal dengan segala jenisnya. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Pihak pemerintah atau negara tidak boleh ikut campur tangan dalam pengembangan ekonomi. Pemerintah hanya berhak membuat regulasi tentang kewajiban membayar pajak kepada para pengembang ekonomi. Hasil pajak itulah yang akan digunakan untuk kepentingan negara terutama dalam menjalankan kewajibannya terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi campur tangan pemerintah sangat dominan. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara. Selanjutnya, sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Islam mengakui kemerdekaan individu, tetapi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi ekonomi pasar yang adil. Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa menghentikan spekulasi harga, mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka yang lemah, baik konsumen maupun pedagang kecil. Oleh karena itu, negara harus berperan secara aktif. Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan dengan apa yang dikenal dengan intervensi dalam terminologi kapitalis. Dengan kata lain, menurut Islam peranan negara sangat penting terutama dalam mengendalikan harga pasar. Masyarakat boleh menentukan harga pasar tetapi tidak bebas. Jika kebebasan itu lalu menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi masyarakat, maka pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya.

**Kata kunci:** ekonomi, kapitalisme/liberalisme, sosialisme, Islam

## **Pendahuluan**

Ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif. Setiap individu, memerlukan ekonomi yang memadai untuk memenuhi keperluannya termasuk sandang, pangan dan papan atau tempat domisili. Secara kolektif, masyarakat juga memerlukan sarana umum seperti; jalan, sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, oleh raga dan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan stabilitas, baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan di ibu kota, peranan ekonomi sangatlah urgen. Tanpa kekuatan ekonomi, kehidupan dan segala aspeknya tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Pengembangan ekonomi, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara individual seseorang dapat mengembangkan ekonomi dengan cara buka usaha bengkel, bertani, mencari ikan di laut dan lain-lain. Secara kollektif orang mendirikan usaha bersama, seperti mendirikan Bank, perkebunan, koperasi, perumahan, dan sebagainya. Dewasa ini, pengembangan ekonomi sudah semakin bebas. Negara-negara asing dapat mengembangkan usaha di negara Indonesia dan juga merambah pada aspek jasa pendidikan dan kesehatan. Produk-produk luar negeri, mulai dari bahan pakaian, bangunan gedung, transportasi, peralatan rumah tangga sudah membanjiri tanah air kita. Produk-produk Cina dengan segala ragamnya sudah menguasai tanah air kita, dan bahkan sudah mengancam pengusaha-pengusaha tradisional. Berbagai jenis pakaian yang kualitasnya bagus dan harganya murah, sudah membanjiri tanah air. Kesemuanya itu, adalah upaya pengembangan ekonomi yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai aspeknya.

Dewasa ini paling tidak ada tiga sistem ekonomi yang terus berkembang yaitu; sistem ekonomi kapitalis/liberal, sosialis dan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pengembangan ekonomi sangat ditentukan oleh masyarakat secara bebas. Dalam sistem ekonomi sosialis pengembangan ekonomi dipegang oleh pihak pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Tulisan ini, akan membahas bagaimana sesungguhnya pengembangan ekonomi dalam Islam. Apakah sistem ekonomi Islam cenderung pada sistem kapitalis yang

pengembangan ekonominya diserahkan kepada para pemodal besar. Atau mungkin seperti dalam sistem ekonomi sosialis, yang pengembangan ekonomi dikuasai oleh pihak Pemerintah, dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bersama. Pembahasan ini, terdiri dari sistem ekonomi kapitalis, sosialis, Islam. Semoga makalah ini dapat bermanfaat kepada para pembaca.

### **1. Sistem Ekonomi Kapitalis**

Kapitalisme bukan hal yang baru untuk diperbandingkan dengan yang lain. Pengaruhnya tampak masih begitu kuat terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia. Hal ini, membuat kapitalisme tak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Kita perlu mengenal sedikit tentang kapitalisme dan sejarah perkembangannya, agar kita mempunyai pengetahuan yang memadai. Kapitalisme dari segi etimologi, berasal dari dua kata *Capital* (modal) dan *isme* (paham atau cara pandang). Kapitalisme sendiri adalah berasal dari bahasa latin yaitu *caput* yang berarti kepala. Dalam pemakaiannya saat ini sudah menjadi populer. Misalnya, dalam istilah pendapatan per-kapita atau pendapatan per-kepala. Apa hubungannya dengan capital yang lain yang sering kita terjemahkan sebagai modal. Dinyatakan dalam sejarah, bahwa kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa kepala hewan ternak yang dimilikinya.<sup>1</sup> Semakin banyak kepalanya, dinilai orang dia semakin sejahtera. Jika mereka mampu mengumpulkan kepala (*caput*) sebanyak-banyaknya dinyatakan sebagai orang yang sejahtera. Dengan demikian jelas, mengapa diterjemahkan capital itu sebagai modal.

Selanjutnya, kata *isme* mengandung makna paham. Ideologi adalah cara pandang atau cara hidup yang diterima oleh kelompok luas masyarakat. Karenanya menjadi konvensi, suatu paham yang berbeda dapat ditolak oleh kelompok masyarakat yang lainnya, sehingga kapitalisme adalah modal dan *isme* atau paham. Jadi kapitalisme adalah paham berdasarkan modal (pemilik modal).

Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian yang menekankan peran Capital atau modal. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Mayoritas pakar ilmu pengetahuan seperti Ebenstein, menyebutkan bahwa kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme

sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek, memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi. Menurut Ayn Rand, kapitalisme adalah “*a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned*”. Artinya, kapitalisme adalah satu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu. Termasuk di dalamnya hak milik, di mana semua pemilikan adalah milik privat. Heilbroner, mengatakan bahwa kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud, mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah formasi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx, juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam *Legitimation Crisis (1988)*, Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial yaitu primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme.<sup>2</sup>

Keadaan menjadi berubah, ketika gelombang industrialisasi melanda negara-negara Eropa Barat. Dalam masyarakat tradisional tersebut terjadi perubahan. Sistem ekonomi bersekala kecil mulai diguncang oleh adanya industrialisasi sebagai sistem ekonomi bersekala besar. Gerakan industrialisasi itu muncul karena pengaruh zaman Renaissance yang melanda Eropa pada abad ke-15 hingga abad 19. Pada waktu itu, terjadi perkembangan ekonomi yang drastis di Eropa. Sekelompok individu maupun kelompok luas dapat bertindak sebagai badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi. Terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis tersebut harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Baru setelah itu buruh menjadi operator atau tenaga produktif agar para kapitalis bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.<sup>3</sup>

Kapitalisme mempunyai sejarah yang cukup panjang yaitu semenjak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan *guild* sebagai cikal bakal kapitalisme. Kapitalisme merupakan cara pandang dalam menjalani kegiatan ekonominya. Hal tersebut bisa dilihat pada Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abad 18, dan berasal dari kata *merchand* yang artinya *pedagang*. Walaupun para ahli masih

meragukan apakah merkantilisme benar merupakan suatu aliran/madzhab atau bukan. Akan tetapi, aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori ekonomi. Aliran ini timbul pada masa perdagangan antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya dengan dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme ini, berkembang faham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara.<sup>4</sup>

Thomas Mun dalam bukunya yang berjudul “*England Treasure by Foreign Trade*” ia menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara, jika menghasilkan surplus dalam bentuk emas dan perak. Keseimbangan perdagangan hanyalah perbedaan antara apa yang diekspor dan apa yang diimpor. Ketika negara mengalami surplus perdagangan, ini berarti ekspor lebih besar daripada impor. Lebih lanjut Thomas Mun menjelaskan bahwa perdagangan domestik tidak dapat membuat negara lebih makmur, karena perolehan logam mulia dari seorang warga negara adalah sama dengan hilangnya logam mulia dari warga negara yang lain. Dengan meningkatkan persediaan uang domestik sebagai hasil dari surplus perdagangan, ternyata dapat juga memunculkan bahaya. Sebabnya, orang akan terpancing untuk membeli lebih banyak barang-barang mewah. Hal ini menyebabkan harga barang dalam negeri akan naik. Akhirnya, akan mengurangi ekspor, karena barang-barang yang diproduksi di dalam negeri akan terlalu mahal bila dijual di luar negeri. Konsekuensi ini bisa dihindari dengan melakukan investasi kembali. Reinvestasi ini akan menciptakan lebih banyak barang untuk diekspor. Thomas Mun mengakui bahwa betapa pentingnya investasi modal dan Ia memandang keseimbangan perdagangan merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan modal produktif.<sup>5</sup>

Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern. Tegasnya, mulai dari abad ke-15 sampai ke-18, dan di era ini kesadaran bernegara sudah mulai muncul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya

banyak peperangan di kalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations*, ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia.<sup>6</sup>

Selanjutnya, Merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini, berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri, dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan. Ketentuan ini, dilakukan dalam usaha meningkatkan perannya dalam perdagangan internasional dan perluasan-perluasan kolonialisme. Faham Kolonialisme sendiri merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang kepada negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Tujuannya, adalah untuk menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi perkembangan industri dan memenuhi kekayaan negara yang melaksanakan politik kolonial tersebut. Pada zaman kolonialisme ini akumulasi modal yang terkonsentrasi di Eropa (Inggris) didistribusikan ke penjuru dunia, yang menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya.<sup>7</sup>

Kelahiran kapitalisme di masa merkantilisme dan kolonialisme dipelopori oleh tiga tokoh besar. Mereka adalah Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonomi. Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik adalah seorang Jerman yang melakukan gerakan monumentalnya. Pada tanggal 31 Oktober 1571 dengan menempelkan tulisan protesnya di seluruh penjuru Roma. Ia tidak menerima kenyataan praktik pengampunan dosa yang diberlakukan Gereja Roma. Dia meletakkan ajaran dasarnya, yaitu ;Manusia menurut kodratnya menjadi suram karena dosa-dosanya. Dengan semata-mata lewat perbuatan dan karya yang lebih baik saja mereka dapat menyelamatkan dirinya dari kutukan abadi. Benjamin Franklin adalah orang yang memberi dasar-dasar filosofik. Dia mengajak orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal atas usahanya sendiri. Kemudian Franklin mengamanatkan “Waktu adalah Uang”.

Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya dan tarcantum dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations*, Adam Smith lebih mengkongkretkan spirit kapitalismenya dalam sebuah konsep sebagai mekanisme pasar. Basis folologisnya adalah *laissez-faire, laissez-passer*. Ia mengatakan bahwa barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Tetapi menurut Smith, yang harus dilihat adalah perilaku produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan meningkat. Ketika keuntungan yang dijanjikan atas barang tersebut tinggi, maka banyak produsen yang memproduksinya. Dengan demikian kelangkaan barang tersebut akan terpenuhi dan menjadi murah. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan oleh *the invisible hands*.<sup>8</sup>

Dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, yang sangat berperan adalah individu, bukan pemerintah. Pihak Pemerintah memberikan kebebasan kepada para pemodal untuk mengembangkan usahanya. Mereka dapat menguasai dan memajukan berbagai aspek ekonomi. Pembangunan sarana jalan, transportasi, berbagai gedung pemerintah dan usaha lainnya ditanangi oleh pihak swasta. Pemerintah tugasnya membuat regulasi untuk membayar pajak yang besar. Hasil dari pajak itulah digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Biaya pendidikan, kesehatan, memelihara fakir dan miskin, orang-orang jompo dan anak-anak jalanan, semuanya ditanggung oleh pemerintah yang diambil dari pungutan pajak dari pihak swasta. Dengan kata lain, bahwa dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Ciri-ciri sistem kapitalis adalah ; (1). Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. (2). Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. (3). Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri. (4). Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno yang disebut hedonisme.<sup>9</sup>

## **2. Sistem Ekonomi Sosialis**

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian atau kegiatan ekonomi yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang, tetapi tetap ada campur

tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang terkait dengan kepentingan hidup orang banyak. Misalnya, air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain-lain. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dan sistem ini, memberikan otoritas demokratisasi terpusat. Sistem Sosialis (*Socialist Economy*) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai berlandaskan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis adalah ;Pemilikan harta oleh negara, Kesamaan ekonomi dan Disiplin Politik. Ciri-ciri Ekonomi Sosialisl (1), Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme), (2),Peran pemerintah sangat kuat dan (3). Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut konsep ekonomi sosialis, sumber kekayaan itu sangat langka. Dia harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

### **Sistem Ekonomi Islam**

M.A. Manan di dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Ekonomi Islam” menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>11</sup> M.Metwally mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadis Nabi (Muhammad) ,Ijma’ dan Qiyas.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur’an dan sunnah. Ia merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.<sup>13</sup>

Selanjutnya, ciri-ciri dan tujuan Ekonomi Islam adalah :

1. Aqidah sebagai substansi (inti) yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi
2. Syari'ah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi
3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Adapun tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat Hayatan tayyibah).<sup>14</sup>

Di antara perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalis, Islam dan Sosialis adalah sebagai berikut :

<b>Konsep</b>	<b>Kapitalis</b>	<b>Islam</b>	<b>Sosialis</b>
Sumber kekayaan	Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources)	Sumber Kekayaan alam semesta dari ALLAH SWT	Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources)
Kepemilikan	Setiap pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya	Sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari ALLAH SWT	Sumber kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga kerja (buruh)

Tujuan Gaya hidup perorangan	Kepuasan pribadi	Untuk mencapai ke makmuran/success (Al-Falah), di dunia dan akhirat	Ke setaraan penghasilan di antara kaum buruh. <sup>15</sup>
------------------------------	------------------	---	---

Konsep ekonomi kapitalis adalah bahwa sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras. Setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistim ekonomi kapitalis, perusahaan dimiliki oleh perorangan. Terjadinya pasar (market) dan terjadinya *demand and supply* adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut pada level yang lebih atas.

Agama Islam, mempunyai konsep yang berbeda tentang kekayaan. Menurut Islam, semua kekayaan di dunia ini adalah milik Allah SWT. Kekayaan itu dititipkan kepada kita, dan segala yang kita miliki harus didapatkan dengan cara yang halal dan tidak boleh dengan cara yang haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>16</sup>

Memakan harta dengan cara yang batil adalah memakan harta dengan jalan yang tidak dibolehkan oleh syariat.<sup>17</sup> Pengertian memakan bukan terbatas pada menikmati secara langsung suatu makanan yang siap saji. Akan tetapi termasuk dalam pengertian makan adalah mengambil atau menggunakan harta dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Islam. Misalnya, mendapatkan harta dengan cara berjudi, hasil riba, merampok, mencuri, hasil dari prostitusi, korupsi

dan lain-lain. Dalam hadis Rasulullah Saw menegaskan bahwa konsep tentang harta ada yang halal, haram dan syubhat, sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. رواه البخاري

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". Hadis riwayat Bukhari no.50.<sup>18</sup>

Dengan dalil-dalil di atas, Islam mempunyai konsep yang jelas tentang harta. Dalam al-Quran dilarang mengambil harta dengan cara yang batil atau sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Dalam hadis ditegaskan bahwa harta itu ada yang halal, haram dan syubhat. Siapa saja yang bergelimir dengan harta yang syubhat pada akhirnya akan jatuh pada yang haram. Islam membenarkan akan orang-orang yang ingin punya property atau perusahaan. Untuk mendapatkannya harus dengan usaha yang keras dan tetap melalui usaha-usaha yang halal. Dengan kata lain, boleh mencari keuntungan yang sebanyak banyaknya tetapi harus sesuai dengan ketentuan dari prinsip prinsip syariah. Aspek yang sangat penting dalam transaksi Ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur Riba (interest) *Maisir* (judi) dan *Gharar* (ke tidak pastian).<sup>19</sup>

Dalam politik ekonomi Islam, negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi. Tugas lainnya yang sangat urgen adalah mencegah terjadinya kezhaliman dengan berbagai bentuknya dan wajib menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Upaya-upaya ini, dapat

dilakukan dengan baik, jika pihak pemerintah memiliki aparat penegak hukum yang kuat, adil dan berani memberantas berbagai kemungkar. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Huud ayat 85 :

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: *Dan Syu`aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."*<sup>20</sup>

Muhammad Al Mubarak, dalam buku *Nizam al-Islam*, menegaskan bahwa negara merupakan salah satu dari tiga pilar dari sistem ekonomi Islam selain yaitu iman (moral) dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.<sup>21</sup> Aswaf Ali, dalam disertasi doktornya, *Political Economy of the Islamic State*, mengatakan bahwa filsafat kemasyarakatan Islam menggambarkan suatu masyarakat ekonomi yang didasarkan pada peranan negara yang luas di dalam bidang perekonomian, perdagangan dan keuangan.<sup>22</sup>

Dr. Fazlur Rahman mengatakan bahwa dalam kepentingan dasar dari keadilan sosial ekonomi, negara harus mencampuri pribadi warga negara, sejauh keadilan sosial ekonomi menuntutnya.<sup>23</sup> Prof. Dr. M. Umer Chapra, juga berpandangan bahwa peranan ekonomi yang aktif oleh negara merupakan segi yang tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi Islam. Chapra menyatakan bahwa penyediaan modal untuk kepentingan sosial serta penataan jaminan sosial merupakan kewajiban penting negara. Negara juga bertanggung jawab untuk menciptakan kemantapan (stabilitas) nilai mata uang, selain usaha penghapusan kemiskinan dan penciptaan kondisi yang sehat untuk pemberian kesempatan kerja yang penuh (*full employment*) serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Chapra, selanjutnya menegaskan bahwa tata cara untuk mencapai semua itu ialah lewat pendidikan, bukan paksa<sup>24</sup> kekuatan pasar berjalan tak terkendali.<sup>25</sup>

Menurut Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ashshiddiqi, peranan negara mencakup empat aspek yaitu; Pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan, dan bila perlu melalui paksaan. Kedua, Menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Ketiga, Mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal, guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Keempat, Perbaikan penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan, pengaturan, maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan.<sup>26</sup>

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menganut paham *laissez faire*. Dalam Islam, pemerintah harus mengatur arus produksi dan distribusi, khususnya mencegah terjadinya kecenderungan dan praktek monopolistik. Ada beberapa prioritas langkah yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan distributif tersebut.

1. Sistem zakat adan kharaj sangat efektif untuk mengalihkan surplus kekayaan dari orang kaya kepada orang-orang miskin.
2. Negara harus mengamati dan mengatur pemerataan distribusi sumber daya alam. Ekonomi Islam tidak membenarkan terjadinya penumpukan asset sumber daya alam pada sekelompok orang tertentu saja. Penguasaan sumber daya alam yang dikuasai swasta harus dibatasi, misalnya, lima ribu hektar sawit.
3. Jasa layanan masyarakat yang menghasilkan keuntungan, seperti kereta api, pos dan telegraf, listrik, air dan gas, harus dikelola negara.
4. Jasa layanan masyarakat yang tidak menghasilkan, seperti jalan raya, tempat umum, tempat parkir dan sebagainya, perlu disubsidi pemerintah dengan menggalakkan sumbangan para donatur.<sup>27</sup>

Adalah tugas negara untuk menerapkan sistem *hisbah*, yaitu pengecekan langsung atas ukuran dan berat, kendali mutu, dan standarisasi. Juga tugas negara untuk melarang praktek spekulasi dan monopoli. Cara yang terbaik adalah dengan menyediakan barang murah di pasar, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab. Dengan cara demikian, harga dapat kembali normal. Negara dalam pandangan Islam, berperan menyediakan kesempatan pelatihan dan menciptakan peluang pekerjaan. Negara membuat program membantu pengangguran. Negara

berperan memberdayakan orang miskin, anak yatim, janda, manula, orang cacat dan seluruh rakyat yang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluannya sendiri.<sup>28</sup>

Rasulullah SAW bersabda : “Siapa yang diberikan Allah amanah menjadi penguasa untuk mengurus urusan kaum muslimin, namun ia acuh tak acuh terhadap kebutuhan dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak memperdulikan kebutuhannya. Dalam hadits lain Rasul SAW bersabda, “Penguasa negara pelindung bagi orang yang tak memiliki pelindung”. Sehubungan dengan itulah, Dr. Mustaq Ahamd, dalam buku *Business Ethics in Islam*, menulis, “Setiap individu bisa menuntut hak dari masyarakat (negara) dimana ia hidup untuk memperoleh pekerjaan. Jadi, tugas utama pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mampu bekerja dan orang yang mau untuk bekerja.”<sup>29</sup>

Selanjutnya, negara hendaklah mengatur untuk memberikan semua kemudahan dan bantuan bagi para pekerja yang ditimpa bencana serta memberikan kepada mereka sebuah kekuatan atau power. Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma’ruf nahi munkar. Tugas ini, menurut Mustaq Ahmad, hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para Gubernur dan pejabat-pejabat yang lain. Jika dia menemukan penyimpangan secara nyata, maka ia menggantinya dengan orang yang lebih baik.<sup>30</sup>

Rasulullah Saw dalam menjalankan amanah sebagai Kepala Pemerintahan, beliau selalu mengadakan pengawasan terhadap orang-orang yang mengumpulkan zakat (amil zakat) dan dia selalu mengecek jumlah zakat yang terkumpul. Dengan adanya perintah Al-Qur’an dan praktek yang dijalankan oleh Rasulullah, maka jelaslah bahwasanya sebuah negara dalam Islam terikat kewajiban untuk menjalankan dan mempraktekkan institusi hisbah ini. Penentuan orang-orang yang melakukan hisbah, menurut Nizham Al-Muluk dilakukan oleh kepala negara. Kewajiban seorang muhtasib adalah :”untuk mengecek dan memeriksa skala dan harga barang dan untuk melihat bisnis dan perdagangan apakah telah dilakukan dengan cara-cara yang benar ataupun tidak. Sejarah memaparkan satu bukti yang sangat jelas bahwasanya untuk melakukan pengawasan yang ketat ini negara

Islam yang ada selalu memperhatikan institusi hisbah. Dalam sebuah bukunya yang berjudul *Arab Administration*, Dr. Husain mengatakan :*“Sejak awal berdirinya negara Islam, perhatian yang sedemikian besar telah diberikan oleh pihak pemerintah untuk melihat kondisi dagangan dan para pedagang apakah dalam melakukan perdangan mereka telah menjalankan aturan seperti yang diajarkan Islam ataupun tidak. Dari semua khalifah Rasyidin, Saidina Ali adalah yang sangat konsern dalam masalah ini. Ia akan keliling ke pasar-pasar di Kufah, dengan membawa cemeti. Sebelumnya praktik ini banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab”*. Khalifah itu berjalan ke pasar-pasar untuk mengontrol apakah takaran dan timbangan dalam bisnis telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan apakah ada orang yang melakukan kecurangan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, beberapa polisi pengaman diperintahkan untuk mengawasi masalah timbangan dan takaran itu.<sup>31</sup>

## **Penutup**

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang di simpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada. Kapitalisme, merupakan sistem perekonomian yang memberikan wewenang penuh kepada Capital atau pemodal dengan segala jenisnya. Termasuk di dalamnya barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Islam mengakui kemerdekaan individu, tetapi Islam tidak memberikan kebebasan mutlak pada kekuatan pasar. Kekuatan pasar yang bebas tidak dengan sendirinya menghasilkan kondisi ekonomi pasar yang adil. Mekanisme pasar yang bebas tidak bisa menghentikan spekulasi harga, mencegah eksploitasi dan tidak menolong mereka yang lemah, baik konsumen maupun pedagang kecil. Oleh karena itu, negara harus berperan secara aktif. Peranan positif negara ini tidak dapat disamakan dengan apa yang dikenal dengan intervensi dalam terminologi kapitalis. Dengan kata lain, menurut Islam peranan negara sangat penting terutama dalam mengendalikan harga pasar. Masyarakat boleh menentukan harga pasar tetapi tidak bebas. Jika kebebasan itu lalu menimbulkan kerusakan atau kesulitan bagi masyarakat, maka pemerintah mempunyai hak untuk menertibkannya.

### Catatan

<sup>1</sup> Pengertian secara sederhana, corak produksi pada waktu itu ditentukan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan di suatu tempat. Misalnya, cara memenuhi kebutuhan makan dan pakaian pada masyarakat kuno berbeda dengan masyarakat sekarang ini. Corak produksi adalah cara masyarakat manusia memproduksi dan mendistribusikan kesejahteraan sosial yang dibuatnya.

<sup>2</sup> Samekto Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm.24

<sup>3</sup> Samekto Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm.24

<sup>4</sup> *Teori Merkantilisme* <http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme>

<sup>5</sup> *Teori Merkantilisme* <http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme>

<sup>6</sup> Teori Merkantilisme dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme>

<sup>7</sup> Galery Artikel, *Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi Industri*, <http://networkedblogs.com/wju11> (online)

<sup>8</sup> Galery Artikel, *Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi Industri*, <http://networkedblogs.com/wju11> (online)

<sup>9</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>

<sup>10</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>

<sup>11</sup> Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, 1992, hlm.19.

<sup>12</sup> M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Pengantar dan Penerjemah M.Husein Sawit, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995, hlm.1. Daud Ali, 1988, hlm.3

<sup>13</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>

<sup>14</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Unoversitas Islam, Indonesia Yogyakarta, Rajawali Pres, 2012, hlm.54.

<sup>15</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan

<sup>17</sup> Imam Baydhwai, *Tafsir Baydhwai*, Dalam Maktabah Syamilah.

<sup>18</sup> Imam Bukhari, Sahih Bukhari, dalam [http://localhost:81/copy\\_open.php?imam=bukhari&nohd=50](http://localhost:81/copy_open.php?imam=bukhari&nohd=50)

<sup>19</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>

<sup>20</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, Jakarta, 1987, hlm.340.

- 
- <sup>21</sup> Muhammad Al-Mubarak, *Nizham al-Islam Al-Iqtishadi*, Beirut, Dar al-Fikri, 1972, hlm. 160
- <sup>22</sup> Aswaf Ali, *Political Economy of The Islamic State*, University of Southern, California, 1970, hlm. 280.
- <sup>23</sup> Fazlur Rahman, *Economic Principles of Islam*, Islamic Studies, Islamabad, dalam Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, Edisi Indonesia, Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, LIPPM dan Media Dakwah, 1986, hlm. 45-46.
- <sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System*, Edisi Indonesia, *Al-Qur'an Menuju System Moneter yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, hlm. 6-19.
- <sup>25</sup> Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, Editor, Munawar Iqbal, Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation, 1998, hlm. 46.
- <sup>26</sup> Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, hlm. 47.
- <sup>27</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>
- <sup>28</sup> <http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>
- <sup>29</sup> Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Pakistan, The International Institute of Islamic Thought, 1995, Edisi Indonesia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 158
- <sup>30</sup> Abdul Hadi, *Al-Fikrah Al-Idariyah Al-Islamiyah wal Muqaranah*, Kairo, Darul Fikri Al-Arabi, 1976, hlm. 179
- <sup>31</sup> Abdul Qadir Husaini, *Arab Administration*, Lahore, Sh Muhammad Asraf, 1966, hlm. 101

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, *Al-Fikrah Al-Idariyah Al-Islamiyah wal Muqaranah*, Kairo, Darul Fikri Al-Arabi, 1976.
- Abdul Qadir Husaini, *Arab Administration*, Lahore, Sh Muhammad Asraf, 1966.
- Aswaf Ali, *Political Economy of The Islamic State*, University of Southern, California, 1970.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Quran, Jakarta, 1987.
- Fazlur Rahman, *Economic Principles of Islam*, Islamic Studies, Islamabad, dalam Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature*, Edisi Indonesia, Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, LIPPM dan Media Dakwah, 1986.
- Galery Artikel, *Kolonialisme, Imperialisme, Merkantilisme, Kapitalisme, Dan Revolusi*

<http://kinanzahirah.wordpress.com/2012/05/23/perbedaan-sistem-ekonomi-sosialis-kapitalis-dan-islam/>

Ibnu Taymiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, Madinah, Islamic University, t.t.

*Industri*, <http://networkedblogs.com/wju11> (online)

M. Umer Chapra mengupas dan mengkritisi secara mendalam dan ilmiah tentang sistem kapitalisme yang telah gagal menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi umat manusia. Lihat *Islam and the Economic Challenge*, International Institute of Islamic Thought, USA, 1992.

M. Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System*, Edisi Indonesia, *Al-Qur'an Menuju System Moneter yang Adil*, Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

M.M Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Pengantar dan Penerjemah M.Husein Sawit, Jakarta, Bangkit Daya Insana, 1995, hlm.1. Daud Ali, 1988.

Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, 1992.

Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa al-Awda' Al-Iqtishadiyah*, Kairo, Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1952.

Muhammad Al-Mubarak, *Nizham al-Islam Al-Iqtishadi*, Beirut, Dar al-Fikri, 1972.

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, Editor, Munawar Iqbal, Islamabad, Institute on Islamic Economics, Leicester, The Islamic Foundation, 1998.

Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, Pakistan, The International Institute of Islamic Thought, 1995, Edisi Indonesia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Universitas Islam, Indonesia Yogyakarta, Rajawali Pres, 2012.

S.M. Yusuf, *Economic Justice in Islam*, Lahore, Sh. Muhammad Asraf, 1971.

Samekto Adji, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Sayid Qutub, *Fi Zilalil Quran*, Beirut Dar Ihya at-Turats, Al-`Arabi, 1967.

Teori Merkantilisme dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Merkantilisme>

Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, Bandung, Remaja Karya, 1986.